

LAPORAN KEUANGAN
TAHUN 2022
Audited



PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

Jl. Gondosuli No.6 Telp (0274) 563153, Fax (0274) 512368 Yogyakarta 55165

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kami atas nama Dinas Kesehatan, menyajikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 disusun sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 99 yang menyebutkan bahwa :

- 1) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggung jawabnya.
- 2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya.
- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- 4) Kepala SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Secara ringkas laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. LAPORAN REALISASI APBD

Laporan Realisasi APBD menggambarkan perbandingan antara APBD Tahun Anggaran 2022 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022, dengan rincian sebagai berikut :

- A. Pendapatan ditetapkan sebesar Rp39.413.700.000,00
realisasinya mencapai sebesar Rp50.843.281.983,39
sehingga lebih dari target sebesar Rp11.429.581.983,39
atau sebesar 129,00 %.
- B. Belanja ditetapkan sebesar Rp327.362.270.188,00
realisasinya mencapai sebesar Rp230.392.828.846,91
sehingga kurang dari anggaran sebesar Rp 96.969.441.341,09
atau sebesar 70,38%.
- C. Surplus/(Defisit) Anggaran ditetapkan defisit sebesar Rp287.948.570.188,00 dengan realisasi defisit sebesar Rp179.549.546.863,52 atau sebesar 62,35%.

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Kesehatan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana pada 31 Desember 2022.

Jumlah Aset per 31 Desember 2022 sebesar	Rp.	261.322.198.933,51
yang terdiri dari Aset Lancar sebesar	Rp.	97.696.209.090,43
Investasi Jangka Panjang sebesar	Rp.	0,00
Aset Tetap sebesar	Rp.	160.307.474.902,21
Dana Cadangan sebesar	Rp.	0,00
dan Aset Lainnya sebesar	Rp.	3.318.514.940,87
Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar	Rp.	657.830.235,63
yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar	Rp.	657.830.235,63
serta Kewajiban Jangka Panjang sebesar	Rp.	0,00
Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar	Rp.	260.664.368.697,88

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Dinas Kesehatan untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos-pos Luar Biasa, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan-LO terdiri dari :

Pendapatan Asli Daerah - LO	Rp.	47.949.384.137,05
Hasil Pemanfaatan BMD yg Tidak Dipisahkan - LO	Rp.	6.000.000,00
Pendapatan dari BLUD – LO	Rp.	47.943.384.137,05
Pendapatan Hibah	Rp.	9.375.426.425,78
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	Rp.	9.183.998.403,00
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri-LO	Rp.	15.000.000,00
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	Rp.	176.428.022,78

Beban, terdiri dari :

Beban Operasi	Rp.	203.213.299.147,86
Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp.	12.464.691.577,29
Surplus/Defisit Operasional	Rp.	(158.353.180.162,33)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut :

Ekuitas Awal	Rp.	227.919.159.708,96
Surplus/Defisit Laporan Operasional	Rp.	(158.353.180.162,33)
RK PPKD	Rp.	191.248.781.390,71
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp.	(150.392.239,46)
Ekuitas Akhir	Rp.	260.664.368.697,88

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, kondisi ekonomi makro, kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai serta peristiwa penting setelah tanggal pelaporan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja dan Pembiayaan menggunakan basis kas yaitu pada saat diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah. Sementara dalam penyajian Neraca dan Laporan Operasional pengakuan Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan-LO, Beban dan Transfer menggunakan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima dan dikeluarkan oleh dan dari kas daerah.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*).

Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan yang transparan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel), serta tepat waktu sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi iv

Pernyataan Tanggung Jawab v

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) vi

Laporan Operasional (LO)..... vii

Neraca viii

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)..... ix

Bab I Pendahuluan 1

 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan 1

 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1

 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan 3

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 5

 2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan 5

 2.2. Hambatan dan Kendala 7

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD 8

 3.1. Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD 8

Bab IV Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD 24

Bab V Penutup 25

Lampiran



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN

دinas Kesehatan

Jalan Gondosuli No. 6 telepon (0274) 563153 faksimile (0274) 512368
Website : dinkes.jogjaprovo.go.id, Email : dinkes@jogjaprovo.go.id
YOGYAKARTA 55165

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN


drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	39.413.700.000	50.843.281.983,39	129,00	38.741.796.742,22
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	39.413.700.000	50.843.281.983,39	129,00	38.741.796.742,22
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	39.413.700.000	50.843.281.983,39	129,00	38.741.796.742,22
	JUMLAH PENDAPATAN	39.413.700.000	50.843.281.983,39	129,00	38.741.796.742,22
5	BELANJA DAERAH	327.362.270.188	230.392.828.846,91	70,38	235.414.174.002,00
5.1	BELANJA OPERASI	290.553.205.157	196.340.868.727,91	67,57	215.806.443.439,00
5.1.01	Belanja Pegawai	107.193.400.779	104.657.293.153,64	97,63	93.184.380.617,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	182.313.404.378	90.638.045.574,27	49,72	121.556.476.124,00
5.1.05	Belanja Hibah	1.046.400.000	1.045.530.000,00	99,92	1.065.586.698,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	290.553.205.157	196.340.868.727,91	67,57	215.806.443.439,00
5.2	BELANJA MODAL	36.809.065.031	34.051.960.119,00	92,51	19.607.730.563,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9.010.269.640	8.170.685.911,00	90,68	12.864.728.314,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.574.310.800	25.671.831.958,00	93,10	5.799.492.249,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.000.000	26.815.000,00	99,31	0,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.484.591	182.627.250,00	92,48	943.510.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	36.809.065.031	34.051.960.119,00	92,51	19.607.730.563,00
	JUMLAH BELANJA	327.362.270.188	230.392.828.846,91	70,38	235.414.174.002,00
	SURPLUS/DEFISIT	(287.948.570.188)	(179.549.546.863,52)	62,35	(196.672.377.259,78)

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes

NIP. 19650912 199303 2 006

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	2022	2021	Kenaikan / Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN	57.324.810.562,83	79.344.250.009,56	(22.019.439.446,72)	(27,75)
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	47.949.384.137,05	41.689.774.994,56	6.259.609.142,49	15,01
7.1.04	Lain-lain PAD yang Sah-LO	47.949.384.137,05	41.689.774.994,56	6.259.609.142,49	15,01
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	47.949.384.137,05	41.689.774.994,56	6.259.609.142,49	15,01
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	9.375.426.425,78	37.654.475.015,00	(28.279.048.589,22)	(75,10)
7.3.01	Pendapatan Hibah-LO	9.375.426.425,78	37.654.475.015,00	(28.279.048.589,22)	(75,10)
	JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	9.375.426.425,78	37.654.475.015,00	(28.279.048.589,22)	(75,57)
	JUMLAH PENDAPATAN	57.324.810.562,83	79.344.250.009,56	(22.019.439.446,72)	(27,75)
8	BEBAN	215.677.990.725,16	286.396.422.603,11	(70.718.431.877,94)	(24,69)
8.1	BEBAN OPERASI	203.213.299.147,86	269.629.960.603,36	(66.416.661.455,49)	(24,63)
8.1.01	Beban Pegawai	105.063.610.590,64	93.101.997.501,00	11.961.613.089,64	12,84
8.1.02	Beban Barang dan Jasa	97.149.688.557,22	175.225.206.934,59	(78.075.518.377,36)	(44,55)
8.1.05	Beban Hibah	1.000.000.000,00	1.065.586.698,00	(65.586.698,00)	(6,15)
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	0,00	2.400.000,00	(2.400.000,00)	(100,00)
8.1.07	Beban Penyisihan Piutang	0,00	234.769.469,77	(234.769.469,77)	(100,00)
	JUMLAH BEBAN OPERASI	203.213.299.147,86	269.629.960.603,36	(66.416.661.455,49)	(24,63)
8.1.08	Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.464.691.577,29	16.766.461.999,75	(4.301.770.422,45)	(25,65)
	JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi	12.464.691.577,29	16.766.461.999,75	(4.301.770.422,45)	(25,65)
	JUMLAH BEBAN	215.677.990.725,16	286.396.422.603,11	(70.718.431.877,94)	(24,69)
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(158.353.180.162,33)	(207.052.172.593,55)	48.698.992.431,21	(23,52)

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN


drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP.19650912 199303 2 006

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

Kode Rekening	Uraian	2022	2021
1	ASET	261.324.598.933,51	228.265.759.304,78
1.1	ASET LANCAR	97.696.209.090,43	86.468.799.828,94
1.1.01	Kas dan Setara Kas	44.824.316.443,47	33.125.081.916,28
1.1.06	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.916.152.226,00	5.810.216.739,01
1.1.10	Penyisihan Piutang	(839.992.987,75)	(1.016.421.010,53)
1.1.11	Beban Dibayar Dimuka	69.358.333,33	100.208.333,33
1.1.12	Persediaan	50.726.375.075,38	48.449.713.850,85
	JUMLAH ASET LANCAR	97.696.209.090,43	86.468.799.828,94
1.3	ASET TETAP	160.309.874.902,21	138.856.213.415,84
1.3.01	Tanah	9.249.665.001,00	9.944.264.763,00
1.3.02	Peralatan dan Mesin	145.990.135.155,98	134.916.237.896,78
1.3.03	Gedung dan Bangunan	139.918.796.578,54	121.886.628.443,76
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	7.314.122.699,34	5.287.031.332,00
1.3.05	Aset Tetap Lainnya	444.675.506,00	432.748.256,00
1.3.06	Konstruksi Dalam Pengerjaan	290.785.000,00	458.299.250,00
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(142.898.305.038,65)	(134.068.996.525,70)
	JUMLAH ASET TETAP	160.309.874.902,21	138.856.213.415,84
1.5	ASET LAINNYA	3.318.514.940,87	2.940.746.060,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	2.617.036.755,00	2.519.938.255,00
1.5.04	Aset Lain-lain	701.478.185,87	420.807.805,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	3.318.514.940,87	2.940.746.060,00
	JUMLAH ASET	261.324.598.933,51	228.265.759.304,78
2	KEWAJIBAN	657.830.235,63	346.599.595,82
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	657.830.235,63	346.599.595,82
2.1.05	Pendapatan Diterima Dimuka	17.500.000,00	17.666.666,67
2.1.06	Utang Belanja	640.330.235,63	328.932.929,15
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	657.830.235,63	346.599.595,82
	JUMLAH KEWAJIBAN	657.830.235,63	346.599.595,82
3	EKUITAS	260.664.368.697,88	227.919.159.708,96
3.1	EKUITAS	260.664.368.697,88	227.919.159.708,96
3.1.01	Ekuitas	69.415.587.307,17	(26.674.282.295,06)
3.1.03	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	191.248.781.390,71	254.593.442.004,02
	JUMLAH EKUITAS	260.664.368.697,88	227.919.159.708,96
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	261.322.198.933,51	228.265.759.304,78

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN

drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006

PEMERINTAHAN PROVINSI DI YOGYAKARTA
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TAHUN ANGGARAN 2022
01 Januari 2022 Sampai 31 Desember 2022

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	227.919.159.708,96	180.741.797.301,30
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(158.353.180.162,33)	(207.052.172.593,55)
RK PPKD	191.248.781.390,71	254.593.442.004,02
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	72.283.300,00	0,00
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
LAIN-LAIN	(222.675.539,46)	(363.907.002,81)
EKUITAS AKHIR	260.664.368.697,88	227.919.159.708,96

Provinsi DI Yogyakarta, 31 Desember 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. PEMBAJUN SETYANINGASTUTIE, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Laporan Keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan masyarakat;
- e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, mengenai kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Keuangan Pemerintah Daerah. Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 8);

17. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 9);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pedoman Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 123);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Persediaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 100);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 32);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Penilaian Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 56);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 57);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 124);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 113) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 33);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2021 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 71);
27. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 104).
28. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 64);

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

	1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
Bab III	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SKPD
	3.1 Rincian dan Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan SKPD
	3.1.1 Pendapatan-LRA
	3.1.2 Belanja
	3.1.3 Aset
	3.1.4 Kewajiban
	3.1.5 Ekuitas
	3.1.6 Pendapatan-LO
	3.1.7 Beban
	3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas
Bab IV	Penjelasan Atas Informasi-Informasi Nonkeuangan SKPD
Bab V	Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH/ KURANG	%
BELANJA DAERAH	327,362,270,188.00	230,392,828,846.91	96,969,441,341.09	70.38
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	196,638,548,491.00	158,700,524,163.91	37,938,024,327.09	80.71
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,931,000.00	35,969,400.00	4,961,600.00	87.88
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31,929,000.00	28,520,500.00	3,408,500.00	89.32
Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	2,281,000.00	1,892,900.00	388,100.00	82.99
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,721,000.00	5,556,000.00	1,165,000.00	82.67
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	93,517,980,193.00	91,111,445,392.00	2,406,534,801.00	97.43
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	93,291,540,193.00	90,886,655,862.00	2,404,884,331.00	97.42
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	220,440,000.00	218,920,000.00	1,520,000.00	99.31
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4,338,000.00	4,286,530.00	51,470.00	98.81
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,662,000.00	1,583,000.00	79,000.00	95.25
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	70,580,000.00	69,423,854.00	1,156,146.00	98.36
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	68,580,000.00	68,300,000.00	280,000.00	99.59
Pengamanan Barang Milik Daerah pada SKPD	2,000,000.00	1,123,854.00	876,146.00	56.19
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	9,315,000.00	4,215,000.00	5,100,000.00	45.25
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	9,315,000.00	4,215,000.00	5,100,000.00	45.25
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,098,049,500.00	891,232,530.00	206,816,970.00	81.17
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	254,256,000.00	245,470,000.00	8,786,000.00	96.54
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216,217,500.00	159,339,919.00	56,877,581.00	73.69
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	68,619,000.00	48,652,200.00	19,966,800.00	70.90
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	35,427,000.00	32,310,645.00	3,116,355.00	91.20
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	70,683,000.00	51,892,334.00	18,790,666.00	73.42
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,926,000.00	5,610,000.00	316,000.00	94.67
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	98,000,000.00	97,707,750.00	292,250.00	99.70
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	348,921,000.00	250,249,682.00	98,671,318.00	71.72
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25,218,946,591.00	23,696,311,919.00	1,522,634,672.00	93.96
Pengadaan Mebel	47,446,000.00	44,750,138.00	2,695,862.00	94.32
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	558,407,000.00	537,563,342.00	20,843,658.00	96.27
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	7,859,591.00	4,287,000.00	3,572,591.00	54.54
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	24,166,960,000.00	22,731,086,000.00	1,435,874,000.00	94.06
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	408,274,000.00	349,625,439.00	58,648,561.00	85.63
Pengadaan Aset Tak Berwujud	30,000,000.00	29,000,000.00	1,000,000.00	96.67

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,370,723,665.00	4,045,420,854.00	325,302,811.00	92.56
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000.00	2,260,500.00	239,500.00	90.42
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1,551,441,200.00	1,259,472,689.00	291,968,511.00	81.18
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,816,782,465.00	2,783,687,665.00	33,094,800.00	98.83
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,109,069,400.00	1,038,286,532.00	70,782,868.00	93.62
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	385,087,400.00	341,096,382.00	43,991,018.00	88.58
Pemeliharaan Mebel	3,100,000.00	3,090,000.00	10,000.00	99.68
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	143,930,000.00	125,346,800.00	18,583,200.00	87.09
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	542,052,000.00	533,991,650.00	8,060,350.00	98.51
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34,900,000.00	34,761,700.00	138,300.00	99.60
Peningkatan Pelayanan BLUD	71,202,953,142.00	37,808,218,682.91	33,394,734,459.09	53.10
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	71,202,953,142.00	37,808,218,682.91	33,394,734,459.09	53.10
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	129,957,229,197.00	71,008,703,905.00	58,948,525,292.00	54.64
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	110,634,209,807.00	54,385,308,904.00	56,248,900,903.00	49.16
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6,498,857,392.00	5,971,810,364.00	527,047,028.00	91.89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	53,495,696,000.00	12,864,699,247.00	40,630,996,753.00	24.05
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	737,805,000.00	616,186,500.00	121,618,500.00	83.52
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	497,507,000.00	446,235,250.00	51,271,750.00	89.69
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	85,166,000.00	84,222,500.00	943,500.00	98.89
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	22,567,000.00	20,066,500.00	2,500,500.00	88.92
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	583,502,000.00	530,666,523.00	52,835,477.00	90.95
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1,189,077,000.00	1,089,871,750.00	99,205,250.00	91.66
Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	316,803,000.00	314,481,150.00	2,321,850.00	99.27
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	208,740,000.00	177,717,548.00	31,022,452.00	85.14
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	3,350,679,450.00	3,038,382,083.00	312,297,367.00	90.68
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	293,700,000.00	240,830,000.00	52,870,000.00	82.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	8,640,000.00	8,608,200.00	31,800.00	99.63
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	29,935,000.00	29,930,000.00	5,000.00	99.98
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43,248,144,965.00	28,887,308,789.00	14,360,836,176.00	66.79
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	67,390,000.00	64,292,500.00	3,097,500.00	95.40
Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	19,283,964,390.00	16,585,311,001.00	2,698,653,389.00	86.01
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4,012,168,000.00	3,265,841,750.00	746,326,250.00	81.40

Pengembangan Rumah Sakit	1,251,400,000.00	205,780,000.00	1,045,620,000.00	16.44
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	1,392,204,940.00	1,206,513,221.00	185,691,719.00	86.66
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan	4,636,576,450.00	4,181,678,704.00	454,897,746.00	90.19
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	164,054,000.00	138,221,981.00	25,832,019.00	84.25
Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	7,827,561,000.00	7,587,275,345.00	240,285,655.00	96.93
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	33,505,000.00	32,609,000.00	896,000.00	97.33
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	33,505,000.00	32,609,000.00	896,000.00	97.33
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	5,550,000.00	5,475,000.00	75,000.00	98.65
Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	5,100,000.00	5,100,000.00	-	100.00
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	450,000.00	375,000.00	75,000.00	83.33
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	232,168,500.00	186,303,750.00	45,864,750.00	80.25
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	232,168,500.00	186,303,750.00	45,864,750.00	80.25
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	165,288,500.00	121,128,050.00	44,160,450.00	73.28
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	66,880,000.00	65,175,700.00	1,704,300.00	97.45
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1,958,000.00	1,891,750.00	66,250.00	96.62
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1,958,000.00	1,891,750.00	66,250.00	96.62
Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	1,958,000.00	1,891,750.00	66,250.00	96.62
PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	532,366,000.00	495,405,278.00	36,960,722.00	93.06
Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya	532,366,000.00	495,405,278.00	36,960,722.00	93.06
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	532,366,000.00	495,405,278.00	36,960,722.00	93.06

2.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Pendapatan Dinas Kesehatan dianggarkan sebesar Rp39.413.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.843.281.983,39 atau 129% Belanja dianggarkan sebesar Rp327.362.270.188,00 dan realisasi sebesar Rp230.392.828.846,91 atau 70,38%. Secara umum target kinerja dapat dicapai dengan baik dan tidak ada kendala yang material dihadapi oleh Dinas Kesehatan.

BAB III
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

	2022	2021 (Audited)
3.1.1 <u>Pendapatan-LRA</u>	<u>Rp50.843.281.983,39</u>	<u>Rp38.741.796.742,22</u>

Pendapatan-LRA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp39.413.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.843.281.983,39 atau 129,00% dengan rincian sebagai berikut:

3.1.1.1 <u>Pendapatan Retribusi -LRA</u>	<u>Rp0,00</u>	<u>Rp0,00</u>
---	----------------------	----------------------

Pendapatan Retribusi-LRA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp0,00 dan realisasi sebesar 0,00 .

3.1.1.2 <u>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah -LRA</u>	<u>Rp50.843.281.983,39</u>	<u>Rp38.741.796.742,22</u>
--	-----------------------------------	-----------------------------------

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp39.413.700.000,00 dan realisasi sebesar Rp50.843.281.983,39 atau 129,00% dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
2.	Pendapatan dari Pengelolaan BLUD	39.407.700.000,00	50.837.281.983,39	129,00
	Jumlah	39.413.700.000,00	50.843.281.983,39	129,00

3.1.2 <u>Belanja</u>	<u>Rp230.392.828.846,91</u>	<u>Rp235.414.174.002,00</u>
-----------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Belanja Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp327.362.270.188,00 dengan realisasi sebesar Rp230.392.828.846,91 atau 70,38%. Rincian realisasi belanja terdiri dari:

3.1.2.1 <u>Belanja Operasi</u>	<u>Rp 196.340.868.727,91</u>	<u>Rp 215.806.443.439,00</u>
---------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Belanja Operasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp290.553.205.157,00 dan realisasi sebesar Rp196.340.868.727,91 atau 67,57%, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.2.1.1 <u>Belanja Pegawai</u>	<u>Rp 104.657.293.153,64</u>	<u>Rp 93.184.380.617,00</u>
---	-------------------------------------	------------------------------------

Belanja Pegawai Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp107.193.400.779,00 dan realisasi sebesar Rp104.657.293.153,64 atau 97,63%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	107.193.400.779,00	104.657.293.153,64	97,63
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	48.371.917.701,00	47.028.197.064,00	97,22
Belanja Gaji Pokok ASN	35.844.723.882,00	35.243.064.289,00	98,32
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	2.961.282.975,00	2.905.060.932,00	98,10
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	532.930.000,00	527.250.000,00	98,93
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	3.019.940.000,00	2.854.343.000,00	94,52
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	562.986.125,00	546.915.000,00	97,15
Belanja Tunjangan Beras ASN	1.883.650.240,00	1.800.723.300,00	95,60

Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95.981.708,00	93.006.634,00	96,90
Belanja Pembulatan Gaji ASN	521.518,00	475.141,00	91,11
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	3.173.695.967,00	2.778.254.224,00	87,54
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	74.051.322,00	71.851.322,00	97,03
Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	222.153.964,00	207.253.222,00	93,29
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	44.919.622.492,00	43.858.458.798,00	97,64
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.976.909.538,00	19.850.587.155,00	99,37
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.911.802.660,00	2.107.143.043,00	72,37
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	204.713.646,00	201.630.914,00	98,49
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.826.196.648,00	21.699.097.686,00	99,42
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	289.020.000,00	287.220.000,0	99,38
Belanja Honorarium	220.440.000,00	218.920.000,00	99,31
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	68.580.000,00	68.300.000,00	99,59
Belanja Pegawai BLUD	13.612.840.586,00	13.483.417.291,64	99,05
Belanja Pegawai BLUD	13.612.840.586,00	13.483.417.291,64	99,05

3.1.2.1.2

Belanja Barang dan Jasa

Rp90.638.045.574,27

Rp121.556.476.124,00

Belanja Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp182.313.404.378,00 dan realisasi sebesar Rp90.638.045.574,27atau 49,72%, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Barang dan Jasa	182.313.404.378,00	90.638.045.574,27	49,72
Belanja Barang	68.252.852.092,00	26.929.318.887,00	39,46
Belanja Barang Pakai Habis	68.252.852.092,00	26.929.318.887,00	39,46
Belanja Barang Tak Habis Pakai	-	-	-
Belanja Jasa	55.569.991.780,00	38.694.148.856,00	69,63
Belanja Jasa Kantor	8.397.977.615,00	7.521.366.767,00	89,56
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	43.081.596.965,00	28.730.845.289,00	66,69
Belanja Sewa Tanah	2.300.000,00	1.725.000,00	75,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	771.250.000,00	418.798.000,00	54,30
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	729.950.000,00	415.500.000,00	56,92
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	5.600.000,00	5.600.000,00	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.313.956.200,00	474.014.000,00	36,08
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.267.361.000,00	1.126.299.800,00	88,87
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-
Belanja Pemeliharaan	1.115.042.450,00	1.026.019.018,00	92,02
Belanja Pemeliharaan Tanah	82.000.000,00	81.500.000,00	99,39
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	538.990.450,00	488.135.368,00	90,56
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	490.052.000,00	452.491.650,00	92,34
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4,000,000.00	3,832,000.00	97,30
Belanja Perjalanan Dinas	840.044.000,00	574.413.050,00	68,38
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	840.044.000,00	574.413.050,00	68,38

Belanja Modal Alat Rumah Tangga	514.340.000,00	486.738.243,00	94,63
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	93.078.000,00	89.580.000,00	96,24
Belanja Modal Alat Studio	89.578.000,00	86.651.000,00	96,73
Belanja Modal Alat Komunikasi	3.500.000,00	2.929.000,00	83,69
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.894.220.640,00	1.672.477.729,00	88,29
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.834.970.640,00	1.616.135.729,00	88,07
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	59.250.000,00	56.342.000,00	95,09
Belanja Modal Alat Laboratorium	4.506.081.450,00	4.070.356.236,00	90,33
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	3.455.594.850,00	3.161.971.540,00	91,50
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	146.000.000,00	144.810.600,00	99,19
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	40.658.000,00	39.132.000,00	96,25
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	527.500.000,00	390.165.000,00	73,96
Belanja Modal Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	336.328.600,00	334.277.096,00	99,39
Belanja Modal Komputer	820.478.800,00	796.260.356,00	97,05
Belanja Modal Komputer Unit	768.173.800,00	745.700.356,00	97,07
Belanja Modal Peralatan Komputer	52.305.000,00	50.560.000,00	96,66
Belanja Modal Peralatan Olahraga	39.000.000,00	37.750.000,00	96,79
Belanja Modal Peralatan Olahraga	39.000.000,00	37.750.000,00	96,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	915.013.500,00	809.597.170,00	88,48
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	915.013.500,00	809.597.170,00	88,48

3.1.2.2.3

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rp25.671.831.958,00

Rp 5.799.492.249,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp27.574.310.800,00 dan realisasi sebesar Rp25.671.831.958,00 atau sebesar 93,10% dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.574.310.800,00	25.671.831.958,00	93,10
Belanja Modal Bangunan Gedung	27.319.310.800,00	25.522.913.750,00	93,42
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	27.319.310.800,00	25.522.913.750,00	93,42
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	255.000.000,00	148.918.208,00	58,40
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	255.000.000,00	148.918.208,00	58,40

3.1.2.2.4

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rp26.815.000,00

Rp0,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp27.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp26.815.000,00

3.1.2.2.5	<u>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</u>	<u>Rp 182.627.250,00</u>	<u>Rp 943.510.000,00</u>
------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp197.484.591,00 dan realisasi sebesar Rp182.627.250,00 atau sebesar 92,48%.

3.1.2.2.6	<u>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD</u>	<u>Rp140.250,00</u>	<u>Rp0,00</u>
------------------	---	----------------------------	----------------------

Belanja Modal Aset Lainnya Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp2.625.000,00 dan realisasi sebesar Rp140.250,00.

3.1.3 Aset

Aset Dinas Kesehatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp261.322.198.933,51 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp97.696.209.090,43 Aset Tetap sebesar Rp160.307.474.902,21 dan Aset Lainnya sebesar Rp3.318.514.940,87 dengan rincian sebagai berikut:

		2022	2021 (Audited)
3.1.3.1	<u>Aset Lancar</u>	<u>Rp97.696.209.090,43</u>	<u>Rp86.468.799.828,94</u>

Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp97.696.209.090,43 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.1.1	<u>Kas dan Setara Kas</u>	<u>Rp44.824.316.443,47</u>	<u>Rp33.125.081.916,28</u>
------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2022 sebesar Rp44.824.316.443,47 terdiri dari Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00, Kas di BLUD sebesar Rp44.824.316.443,47 Adapun rincian saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	-
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	7.025.358.067,62
3.	Bapel Jamkessos	-
4.	Bapelkes	3.902.003.430,00
5.	RSJ Grhasia	14.627.678.890,85
6.	RSP Respira	19.269.276.055,00
	Jumlah	44.824.316.443,47

3.1.3.1.2	<u>Piutang Pendapatan</u>	<u>Rp2.916.152.226,00</u>	<u>R5.810.216.739,01</u>
------------------	----------------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.916.152.226,00, terdiri dari saldo Piutang Pendapatan di RSP Respira sebesar Rp965.097.350,00 dan RSJ Grhasia sebesar Rp1.951.054.876,00.

1.1.6.03.02	<u>Beban Jasa Dibayar Dimuka</u>	<u>Rp69.358.333,33</u>	<u>Rp100.208.333,33</u>
--------------------	---	-------------------------------	--------------------------------

Saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp69.358.333,33 merupakan saldo Beban Dibayar Dimuka di Dinkes berupa Sewa Tanah Tower Repiter PSC 119 sebesar Rp15.000.000,00, RSP Respira berupa Sewa tanah lapangan parkir sebesar Rp1.375.000,00 dan RSJ Grhasia berupa sewa tanah untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp52.983.333,33.

3.1.3.1.4

Penyisihan Piutang

(Rp839.992.987,75)

(Rp1.016.421.010,53)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp839.992.987,75) terdiri dari Penyisihan Piutang di RSP Respira sebesar (Rp4.825.486,75) dan RSJ Grhasia sebesar (Rp835.167.501,00).

3.1.3.1.5

Persediaan

Rp50.726.375.075,38

Rp48.449.713.850,85

Saldo Persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp50.726.375.075,38 dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
	Persediaan	50.726.375.075,38
	Barang Pakai Habis	50.726.375.075,38
1	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.632.000,00
2	Bahan Kimia	19.575.574.573,10
3	Bahan Bakar dan Pelumas	63.898.000,00
4	Bahan/Bibit Tanaman	0,00
5	Isi Tabung Gas	900.000,00
6	Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	10.675.500,00
7	Bahan Lainnya	9.504.725.326,34
8	Suku Cadang Alat Kedokteran	458.278.245,00
9	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00
10	Alat Tulis Kantor	180.242.642,10
11	Kertas dan Cover	306.160.118,46
12	Bahan Cetak	42.352.593,00
13	Benda Pos	1.320.000,00
14	Bahan Komputer	44.782.520,00
15	Perabot Kantor	114.582.526,40
16	Alat Listrik	150.881.460,00
17	Perlengkapan Dinas	3.600.000,00
18	Suvenir/Cendera Mata	0,00
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	321.105.905,00
20	Obat	19.825.834.215,98
21	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	45.530.000,00
22	Natura	73.299.450,00

Adapun rincian Persediaan per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	40.005.499.986,23
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	3.782.221.273,00
3.	Bapel Jamkessos	27.188.891,91
4.	Bapelkes	99.889.481,00
5.	RSJ Grhasia	1.711.827.714,65
6.	RSP Respira	5.099.747.728,59
	Jumlah	50.726.375.075,38

3.1.3.2

Aset Tetap

Rp160.307.474.902,21

Rp138.856.213.415,84

Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp160.307.474.902,21 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.2.1

Tanah

Rp9.249.665.001,00

Rp9.944.264.763,00

Saldo Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp9.249.665.001,00 dengan rincian sebagai berikut:

Alat Kantor dan Rumah Tangga	25.429.428.265,37
Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.165.841.272,58
Alat Kedokteran dan Kesehatan	43.279.024.635,50
Alat Laboratorium	46.697.099.815,60
Komputer	7.609.810.805,00
Alat Keselamatan Kerja	565.462.389,00
Peralatan Proses/Produksi	42.480.000,00
Rambu-rambu	168.828.700,00
Peralatan Olahraga	162.120.718,00
Jumlah	145.990.135.155,98

Adapun rincian saldo Peralatan Mesin per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	15.219.294.535,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	40.284.940.531,68
3.	Bapel Jamkessos	2.507.533.225,00
4.	Bapelkes	8.792.019.255,00
5.	RSJ Grhasia	31.615.312.030,00
6.	RSP Respira	47.571.035.579,30
	Jumlah	145.990.135.155,98

3.1.3.2.3 Gedung dan Bangunan Rp139.918.796.578,54 Rp121.886.628.443,76

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp121.886.628.443,76 pada tahun 2022 terjadi transaksi sebagai berikut:

- Mutasi tambah:
- Penambahan dari belanja Modal sebesar Rp25.671.831.958,00
 - Penerimaan hibah dari BPBD: di Dinas Kesehatan sebesar Rp223.968.728,00
 - Kapitalisasi: di RSJ Grhasia sebesar Rp366.765.495,00 dan BLKK sebesar Rp384.406.000,00
- Mutasi kurang:
- Usulan Penghapusan di BLKK sebesar Rp424.487.640,00
 - Diserahkan ke Pemda DIY di Dinas kesehatan DIY sebesar Rp1.601.817.127,00 dan Bapelkes sebesar Rp671.415.791,00
 - Reklas antar akun di RSJ Grhasia sebesar Rp48.710.208,00, BLKK sebesar Rp5.868.373.280,22

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp139.918.796.578,54 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bangunan Gedung	138.884.025.685,54
2.	Monumen/Bangunan Bersejarah	419.514.500,00
3.	Tugu Titik Kontrol/Pasti	615.256.393,00
	Jumlah	139.918.796.578,54

Adapun rincian saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	14.383.691.660,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	20.276.508.304,78
3.	Bapel Jamkessos	3.177.086.996,00
4.	Bapelkes	12.006.081.421,00
5.	RSJ Grhasia	60.360.592.689,76
6.	RSP Respira	29.714.835.507,00
	Jumlah	139.918.796.578,54

3.1.3.2.4

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Rp7.314.122.699,34

Rp5.287.031.332,00

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.287.031.332,00 mutasi tambah di TA 2022 sebesar Rp2.027.091.367,34 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- Mutasi tambah:
- Penambahan dari belanja Modal sebesar Rp26.815.000,00
 - Kapitalisasi: di RSJ Grhasia sebesar Rp33.614.208,00 dan BLKK sebesar Rp1.993.477.159,34
- Mutasi kurang:
- Reklas antar akun di BLKK sebesar Rp26.815.000,00

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp7.314.122.699,34 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Jalan dan Jembatan	251.669.629,00
Bangunan Air	1.848.364.939,00
Instalasi	2.214.845.338,42
Jaringan	2.999.242.792,92
Total	7.314.122.699,34

Adapun rincian saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	151.411.654,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	2.709.687.084,34
3.	Bapel Jamkessos	588.102.883,00
4.	Bapelkes	499.024.102,00
5.	RSJ Grhasia	3.249.485.676,00
6.	RSP Respira	116.411.300,00
	Jumlah	7.314.122.699,34

3.1.3.2.5

Aset Tetap Lainnya

Rp444.675.506,00

Rp432.748.256,00

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp432.748.256,00 di tahun 2022 ada penambahan dari belanja modal sebesar Rp182.627.250,00 mutasi tambah di RSJ Grhasia sebesar

Rp7.500.000,00 berupa Pembelian buku dari BM Peralatan dan Mesin dan mutasi kurang ke persediaan sebesar Rp178.200.000,00 sehingga saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 menjadi Rp444.675.506,00 rinciannya sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Bahan Perpustakaan	344.058.706,00
2.	Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, Olahraga	82.616.800,00
3.	Tanaman	18.000.000,00
	Jumlah	444.675.506,00

Adapun rincian saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	47.475.970,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	27.228.550,00
3.	Bapel Jamkessos	5.417.655,00
4.	Bapelkes	78.248.921,00
5.	RSJ Grhasia	223.392.560,00
6.	RSP Respira	62.911.850,00
	Jumlah	444.675.506,00

3.1.3.2.6

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Rp290.785.000,00

Rp458.299.250,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp458.299.250,00 mutasi kurang di TA 2022 sebesar Rp167.514.250,00 dengan penjelasan perubahan mutasi sebagai berikut:

- Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan di RSJ Grhasia sebesar Rp282.150.000,00 berasal dari Belanja Barang dan Jasa.
- Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan di RSJ Grhasia sebesar Rp65.258.250,00 merupakan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan dan Gedung
- Mutasi Kurang Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp22.734.496.000,00 di BLKK merupakan reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Bangunan dan Gedung Sebesar Rp16.866.122.719,78, Peralatan dan Mesin Sebesar Rp3.874.896.120,88 dan Irigasi Jaringan sebesar Rp1.993.477.159,34

Berdasarkan mutasi tersebut maka saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp290.785.000,00. Adapun rincian saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut:

No	KPA	Jumlah
1.	Dinas Kesehatan	0,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	0,00
3.	Bapel Jamkessos	0,00
4.	Bapelkes	0,00
5.	RSJ Grhasia	290.785.000,00
6.	RSP Respira	0,00
	Jumlah	290.785.000,00

3.1.3.2.7

Akumulasi Penyusutan

(Rp142.900.705.038,65)

(Rp134.068.996.525,70)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 sebesar Rp142.900.705.038,65 dan ada *koreksi BPK berupa akumulasi penyusutan peralatan dan mesin di BLKK sebesar Rp2.400.000,00* dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	110.893.521.005,50
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	29.730.434.650,93
3	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.211.586.582,24
4	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	65.162.799,98
	Jumlah	142.900.705.038,68

Adapun rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	Akumulasi Penyusutan	KPA					
		Dinkes	BLKK	Jamkessos	Bapelkes	Grhasia	Respira
1	Peralatan dan Mesin	12.517.004.111,18	23.475.168.930,93	1.896.032.900,00	7.199.787.437,12	25.850.659.126,07	39.954.868.500,20
2	Gedung dan Bangunan	4.924.070.507,19	1.143.384.145,16	2.074.276.246,10	3.377.371.145,84	11.918.552.895,13	6.292.779.711,51
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.065.791,94	534.915.726,48	147.124.377,05	122.568.942,65	1.263.790.705,20	81.121.038,92
4	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	1.496.800,00	63.665.999,98	0,00
	Jumlah	17.503.140.410,31	25.153.468.802,57	4.117.433.523,15	10.701.224.325,61	39.096.668.726,38	46.328.769.250,63

3.1.3.3

Aset Lainnya

Rp3.318.514.940,87

Rp2.940.746.060,00

Aset Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.318.514.940,87 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.3.3.3

Aset Tak Berwujud

Rp2.617.036.755,00

Rp2.519.938.255,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.519.938.255,00 pada tahun 2022 ada mutasi tambah di Bapel Jamkessos berupa pembelian software dari Belanja Barang Jasa sebesar Rp29.000.000,00 dan di RSP Respira berupa pembelian Software Laboratory Information System (LIS) sebesar Rp68.098.500,00 sehingga saldo Aset tak Berwujud pada 31 Desember 2022 sebesar Rp2.617.036.755,00. Adapun rincian saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 di masing-masing KPA adalah sebagai berikut :

No	KPA	Jumlah	Keterangan
1.	Dinas Kesehatan	6.500.000,00	Kajian 6.500.000,00
2.	Balai Labkes dan Kalibrasi	291.689.545,00	Software Rp48.000.000,00 dan Kajian Rp243.689.545,00
3.	Bapel Jamkessos	126.500.000,00	Software Rp29.000.000,00 dan Kajian Rp97.500.000,00
4.	Bapelkes	88.161.100,00	Kajian Rp88.161.100,00
5.	RSJ Grhasia	1.804.784.670,00	Kajian Rp1.804.784.670,00
6.	RSP Respira	299.401.440,00	Software 68.098.500,00 dan Kajian

Koreksi selisih revaluasi aset tetap	0,00
Lain-lain	(222.675.539,46)
Ekuitas Akhir	260.664.368.697,88

2022

3.1.6

Pendapatan-LO

Rp57.324.810.562,83

Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp57.324.810.562,83 meliputi Lain-lain PAD yang sah-LO sebesar Rp47.949.384.137,05 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO sebesar Rp9.375.426.425,78 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.6.1

Lain-lain PAD Yang Sah -LO

Rp47.949.384.137,05

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp47.949.384.137,05 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2021
1.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	6.000.000,00
2.	Pendapatan BLUD-LO	47.943.384.137,05
	Jumlah	47.949.384.137,05

3.1.6.2

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah -LO

Rp9.375.426.425,78

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada Tahun 2022 sebesar Rp9.375.426.425,78 dan ada *koreksi BPK berupa Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO sebesar Rp176.428.022,78. Koreksi tersebut ada di RSJ Grhasia sebesar Rp160.153.643,83 dan di RSP Respira sebesar Rp16.274.378,95* Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	2021
1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	9.183.998.403,00
2.	Pendapatan Hibah dari badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri	15.000.000,00
3.	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis-LO	176.428.022,78
	Jumlah	9.375.426.425,78

2022

3.1.7

Beban

Rp215.677.990.725,16

Realisasi Beban Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp215.677.990.725,16 adalah penurunan manfaat ekonomi, jasa, pengeluaran dan konsumsi aset selama periode Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1

Beban Operasi

Rp203.213.299.147,86

Realisasi Beban Operasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp203.213.299.147,86 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp105.063.610.590,64 Beban Barang dan Jasa sebesar Rp97.149.688.557,22 dan Beban Hibah sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

3.1.7.1.1 Beban Pegawai

Rp105.063.610.590,64

Realisasi Beban Pegawai Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp105.063.610.590,64 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	47.061.770.721,00
Beban Gaji Pokok ASN	35.253.050.569,00
Beban Tunjangan Keluarga ASN	2.905.456.682,00
Beban Tunjangan Jabatan ASN	527.310.000,00
Beban Tunjangan Fungsional ASN	2.876.845.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	546.920.000,00
Beban Tunjangan Beras ASN	1.800.723.300,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	93.630.654,00
Beban Pembulatan Gaji ASN	475.748,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2.778.254.224,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	71.851.322,00
Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	207.253.222,00
Beban Tambahan Penghasilan ASN	43.858.458.798,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	19.850.587.155,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.107.143.043,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	201.630.914,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.699.097.686,00
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	287.220.000,00
Beban Honorarium	218.920.000,00
Beban Jasa Pengelolaan BMD	68.300.000,00
Total	105.063.610.590,64

3.1.7.1.2 Beban Barang dan Jasa

Rp97.149.688.557,22

Realisasi Beban Barang dan Jasa Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp97.149.688.557,22 dan ada *koreksi BPK Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp75.261.930,00. Koreksi ada di RSJ Grhasia sebesar Rp13.327.805,00 dan pada aset ekstra komptabel sebesar Rp61.934.125,00* dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Barang	41.812.103.526,22
<i>Beban Barang Pakai Habis</i>	41.812.103.526,22
Beban Jasa	39.004.187.043,00
Beban Jasa Kantor	7.922.572.954,00
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	28.730.845.289,00
Beban Sewa Tanah	32.575.000,00
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	418.798.000,00
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	415.500.000,00
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	5.600.000,00
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	380.996.000,00
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.097.299.800,00
Beban Pemeliharaan	1.083.925.948,00
Beban Pemeliharaan Tanah	81.500.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	470.780.368,00

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	527.753.580,00
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	3.892.000,00
Beban Perjalanan Dinas	574.413.050,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	574.413.050,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00
Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	48.000.000,00
Total	97.149.688.557,22

3.1.7.1.3 Hibah

Rp1.000.000.000,00

Realisasi Beban Hibah Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 dan ada reklasifikasi dari Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp45.530.0000,00 ke Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat yang berupa Babyscale, Timbangan badan digital dan Staturometer, sehingga beban hibah di Dinas Kesehatan Induk dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	0,00
Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0,00
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang BerbadanHukum Indonesia	1.000.000.000,00
<i>Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	1.000.000.000,00
Total	1.000.000.000,00

3.1.7.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Rp12.464.691.577,29

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.462.291.577,29 dan ada *koreksi BPK berupa beban penyusutan peralatan dan mesin di BLKK sebesar Rp2.400.000,00 dan kelebihan pencatatan pada beban penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan sebesar Rp0,04* dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Realisasi
1.	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	9.937.230.853,62
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.360.131.781,17
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	163.008.109,16
4.	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	1.920.833,35
	Jumlah	12.464.691.577,29

3.1.7.3 Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO

(Rp158.353.180.162,33)

Surplus/Defisit Kegiatan Operasional -LO sebesar (Rp158.353.180.162,33) berasal dari Pendapatan-LO sebesar Rp57.324.810.562,83 dikurangi Beban sebesar Rp215.677.990.725,16

3.1.8 Laporan Perubahan Ekuitas

Saldo Ekuitas sebesar Rp260.664.368.697,88 merupakan kekayaan bersih SKPD yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban SKPD pada tanggal 31 Desember 2022. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah Surplus/Defisit-LO dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2022
EKUITAS AWAL	227.919.159.708,96
Surplus/Defisit-LO	(158.353.180.162,33)
RK PPKD	191.248.781.390,71
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	
Koreksi Nilai Persediaan	72.283.300,00
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00
Lain-lain	(222.675.539,46)
JUMLAH EKUITAS AKHIR	260.664.368.697,88

Dampak kumulatif perubahan sebesar (Rp150.392.239,46) dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dinkes	
Mutasi Aset dari BPBD	1.546.966.322,34
Mutasi Persediaan dari BPBD	72.283.300,00
Mutasi Aset ke Pemda DIY	(925.471.449,76)
Koreksi kelebihan catat Beban Penyusutan AT	(0,04)
Bapelkes	
Mutasi Aset ke Pemda DIY	(924.947.524,00)
RSJ GRHASIA	
Verifikasi atas aset yang belum tercatat	<u>80.777.112,00</u>
Jumlah	(150.392.239,46)

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN SKPD

-

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan laporan keuangan berbasis akrual yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang selambat-lambatnya harus diterapkan pada Tahun 2015.

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Tahun 2022 merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Entitas Akuntansi pada Kuasa Pengguna Anggaran dan disusun dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang terintegrasi sejak penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Untuk penyajian aset tetap di neraca didukung dengan SIPD Modul Aset.

Perencanaan anggaran Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan dalam pelaporan kode rekening pendapatan dan belanja yang digunakan dalam penganggaran dikonversi sesuai dengan Bagan Akun Standar pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Laporan Keuangan Tahun 2022 yang telah kami sajikan ini masih belum sempurna, sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, sebagai bahan penyempurnaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan untuk periode yang akan datang, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan.

Yogyakarta, 31 Desember 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN



drg. Pembajun Setyaningastutie, M.Kes
NIP. 19650912 199303 2 006